

**EKSISTENSI, PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB
PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM**

TESIS

Oleh

MANGAPUL SITANGGANG

2202190116



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2025

**EKSISTENSI, PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB
PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

MANGAPUL SITANGGANG

2202190116



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MANGAPUL SITANGGANG

NIM : 2202190116

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “EKSISTENSI, PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB PERSEROAAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karyatugas akhir ini dianggap batal.



Jakarta, 30 Januari 2025

Mangapul Sitanggang
NIM: 2202190116



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**EKSISTENSI, PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB
PERSERORAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM**

Oleh:

Nama : MANGAPUL SITANGGANG
NIM : 2202190116
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

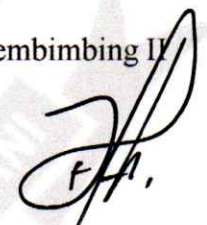
Jakarta, 30 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141103/9903002872


Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Direktur
Program Pascasarjana




Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/0305097105




Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadea, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 30 Januari 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : MANGAPUL SITANGGANG

NIM : 2202190116

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “EKSISTENSI, PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tim Penguji

Tanda tangan

1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Sebagai Ketua.....

2. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.

Sebagai Anggota.....

3. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

Sebagai Anggota.....

Jakarta, 30 Januari 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MANGAPUL SITANGGANG

NIM : 2202190116

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : EKSISTENSI, PENGAWASAN DAN TANGGUNG
JAWAB PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN
SEBAGAI BADAN HUKUM.

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2025



Mangapul Sitanggang
Mangapul Sitanggang
NIM: 2202190116

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkah dan Karunia-Nya yang selalu menyertai, sehingga penyusunan tesis berjudul “EKSISTENSI, PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM”, dapat terselesaikan, yang disusun sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan adanya perubahan norma hukum terkait aturan Perseroan Terbatas. Pemahaman yang melekat didalam kehidupan masyarakat, yang khususnya pelaku usaha/ bisnis, bahwa Perseroan Terbatas wajib didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), pendirian Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu), itulah badan hukum baru yang dinamakan dengan Perseroan Terbatas Perorangan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan para pembimbing, oleh karena itu ucapan terimakasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, serta penguji, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya tesis ini.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Bapak Edward Sirait, S.E. selaku Ketua Yayasan Univesitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Univesitas Kristen Indonesia (UKI).

3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA Direktur Program Pascasarjana Univesitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Bapak Dr. Paltiada Saragih, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Univesitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Pembimbing pada Ujian Penelitian Proposal, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Univesitas Kristen Indonesia (UKI) yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan tesis ini, yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

Secara khusus, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibunda terhormat (Op. Putra Sitanggang/ Br. Naibaho).
2. Teristimewa anak-anak yang penulis cintai dan sayangi, serta banggakan (Aditya Rezeky Sitanggang, Elina Veronica Sitanggang, Cornelius Arvano Sitanggang), beserta istri.
3. Seluruh keluarga dan kerabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga tesis ini bisa diselesaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi dibidang hukum lingkungan.

Jakarta, 30 Januari 2025

Penulis



Mangapul Sitanggang

NIM: 2202190116

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
 BAB I Pendahuluan	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsep	13
F. Metode Penelitian	17
1. Spesifikasi Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data	20
6. Lokasi Penelitian	21
G. Orisinalitas Penelitian	21
H. Sistematis Penelitian	22
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 24
A. Teori-teori Hukum	24

1. Teori Badan Hukum	24
2. Teori Kepastian Hukum	28
B. Tinjauan Tentang Badan Hukum	30
C. Tinjauan Umum Tentang Subjek Hukum	34
D. Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia	41
1. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum	41
2. Badan Usaha Berbadan Hukum	49
E. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	54
1. Pengertian Perseroan Terbatas	54
2. Organ Perseroan Terbatas	57
3. Asas-Asas Perseroan Terbatas	59
4. Asas-Asas Hukum Korporasi di Indonesia	66
F. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	70
BAB III HAKIKAT PT PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM	75
A. Sejarah Perseroan Terbatas	75
B. Perubahan Norma Hukum Terkait Aturan Perseroan Terbatas	80
C. Bentuk-bentuk Perseroan Terbatas di Indonesia	92
D. Pendirian dan Eksistensi Perseroan Terbatas Perorangan Memperoleh Status Badan Hukum Menurut Undang-Undang Cipta Kerja	95
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN	114
A. Pengawasan Perseroan Terbatas	114
B. Pengawasan Terhadap Perseroan Terbatas Perorangan	121
C. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas	125
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA `	143

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang salah satu klasternya membuat perubahan dan penambahan ketentuan terkait Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU Cipta Kerja memunculkan pemahaman baru mengenai Perseroan Terbatas. Pada umumnya masyarakat Indonesia memahami bahwa suatu Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri. Namun dengan hadirnya UU Cipta Kerja yang membuat pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas Usaha Menengah dan Kecil oleh satu pendiri (*single shareholder*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Badan Hukum? 2) Bagaimana pengawasan dan tanggungjawab pemilik saham dan Perseroan Terbatas Perorangan itu sendiri? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum tertulis sebagai data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berkaitan dengan penelitian untuk menyajikan gambaran nyata permasalahan mengenai Perseroan Terbatas Perorangan sebagai badan hukum di Indonesia sebagaimana persyaratan menjadi badan hukum. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) bahwa pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dilakukan berdasarkan: a) dinyatakan sebagai badan hukum oleh undang-undang, b) mempunyai kekayaan tersendiri, c) Sebaiknya Pemerintah dan regulator tidak menggunakan nama Perseroan Terbatas (PT) dalam PT Perorangan agar tidak merusak asas-asas korporasi. disetujui oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 153A dan Pasal 153B UU Cipta Kerja juga tertuang dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Namun karena Perseroan Terbatas Perorangan adalah korporasi, sehingga keberadaannya adalah melanggar beberapa asas-asas korporasi, yaitu: 1. Asas Pemisahan Kekayaan (*Separate Legal Entity*). 2. Asas Organisasi Korporasi (*Corporate Organ Doctrine*). Dengan demikian Perseroan Terbatas Perorangan tidak menciptakan tata kelola korporasi yang baik dan berkelanjutan. Pengawasan dan tanggung jawab Perseroan Terbatas Perorangan yang tidak memiliki komisariss sebagai pengawas, maka pengawasan pada perjalanan Perseroan Terbatas Perorangan dalam kategori lemah. Tidak ada pengawasan internal didalam tubuh Perseroan Terbatas Perorangan terhadap kebijakan Direksi.

Kata Kunci: Perseroan, Perorangan, Badan Hukum.

ABSTRACT

Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, one of the clusters of which makes changes and additions to provisions related to Limited Liability Companies, as stated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The Job Creation Law gives rise to a new understanding of Limited Liability Companies. In general, the Indonesian public understands that a Limited Liability Company is established by at least 2 (two) founders. However, with the presence of the Job Creation Law which makes regulations regarding the establishment of Limited Liability Companies for Medium and Small Enterprises by one founder (single shareholder). The formulation of the problem in this study is: 1) How is a Sole Proprietorship as a Legal Entity? 2) What are the supervision and responsibilities of shareholders and the Sole Proprietorship itself? This research uses a normative juridical research type, namely a study that analyzes written law as secondary data. The approach methods used are the statute approach, the comparative approach, and the conceptual approach, which are related to the research to present a real picture of the problems regarding Individual Limited Liability Companies as legal entities in Indonesia as well as the requirements to become a legal entity. The research results obtained are: 1) that the establishment of an Individual Limited Liability Company is carried out based on: a) being declared a legal entity by law, b) having its own assets, c) It is better for the Government and regulators not to use the name Limited Liability Company (PT) in an Individual PT so as not to damage the principles of the corporation. approved by the government. In accordance with the provisions of Article 153A and Article 153B of the Job Creation Law, also stated in the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 8 of 2021. However, because a Sole Proprietorship is a corporation, its existence violates several corporate principles, namely: 1. The Principle of Separation of Assets and 2. The Principle of Corporate Organization. Therefore, a Sole Proprietorship does not foster good and sustainable corporate governance. The oversight and responsibility of a Sole Proprietorship without a board of commissioners is weak. There is no internal oversight within a Sole Proprietorship regarding the Board of Directors' policies.

Keywords: Company, Sole Proprietorship, Legal Entity.